

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perilaku

2.1.1 Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan segala sesuatu tindakan dari seorang individu atau kelompok itu sendiri, baik perilaku yang dapat diamati secara langsung (*inert behaviour*) atau tindakan yang sulit diamati orang lain (*covert behaviour*). Perilaku sendiri dapat dibedakan dalam dua kategori:

- 1) *Covert Behaviour* adalah perilaku yang dilakukan jika respon atau reaksi terhadap stimulus belum dapat di amati langsung oleh orang lain (*Unobservable Behavior*) apabila respons yang di alami tersebut sulit untuk di amati oleh orang lain maka hal tersebut dapat disebut dengan *Knowledge* dan *Attitude*.
- 2) Tindakan Terbuka (*Inert Behaviour*) adalah respon yang tertuang dalam bentuk suatu tindakan yang kemudian dapat di amati dari luar (*observable behavior*) dan biasa disebut *Practice*.

Menurut teori perilaku Skinner, yang diambil oleh Notoatmodjo (2003: 113) menjelaskan bahwa suatu perilaku adalah wujud dari sebuah tanggapan atau respon manusia terhadap suatu *rangsangan*. Hal tersebut karena tindakan yang terjadi akibat proses stimulus terhadap ekosistem sehingga dapat menghasilkan reaksi.

Perilaku terhadap Kebersihan Lingkungan merupakan wujud dari interaksi individu kepada lingkungan sekitar sebagai usaha untuk menjaga kesehatan makhluk disekitarnya. Apabila seseorang mampu memanfaatkan lingkungan secara bijak, diikuti dengan pemeliharaan atau pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan maka lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap manusia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi saat ini banyak manusia yang melakukan kerusakan

terhadap lingkungan, namun tidak banyak pula yang melakukan penghijauan terhadap lingkungan. Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan tidak diimbangi dengan perilaku positif dari manusia sehingga alam memberikan dampak negative karena ulah dari manusia itu sendiri.

Acuan dari suatu perilaku seseorang dalam kesehatan dibedakan atas dua kategori (Notoatmojo, 2010:24), yaitu :

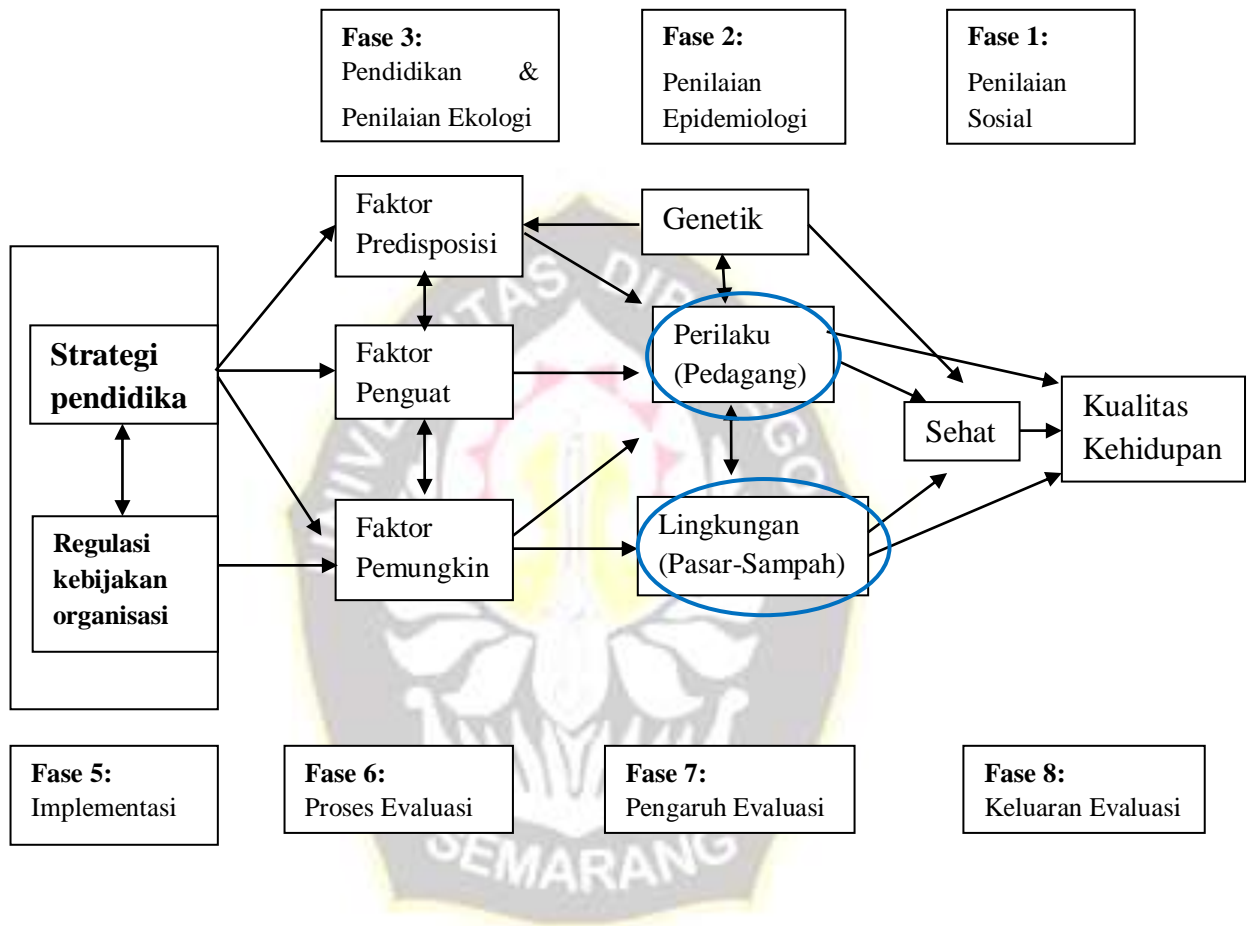
- a. *Health behaviour* merupakan tindakan seseorang yang tidak sakit untuk melakukan *preventif* terhadap suatu penyakit dan meningkatkan kesehatan, dan tindakan untuk menjaga dan usaha untuk meningkatkan status kesehatannya.
- b. *Health seeking behaviour* adalah tindakan orang yang tidak sehat untuk mendapatkan kesembuhan dan rehabilitasi terhadap kondisi kesehatannya sering disebut sebagai tindakan *curatif* dan *rehabilitative*

2.1.2 Determinan Perilaku

Precede - Proceed Theory ditemukan oleh Lawrence Green (1980) melakukan analisis terhadap perilaku makhluk hidup dari segi kesehatan. Status kesehatan individu dapat disebabkan oleh dua akibat utama, yaitu *Human factors* itu sendiri (*behaviour causes*) dan *Non-human factors* (*non behaviour causes*).

Perilaku kesehatan dianggap dipengaruhi oleh faktor-faktor individu maupun lingkungan, dan karena itu memiliki dua bagian yang berbeda. Pertama PRECEDE (*Predisposing, Reinforcing, Enabling, Constructs in, Educational/Ecological, Diagnosis, Evaluation*). Kedua PROCEED (*Policy, Regulatory, Organizational, Constructs in, Educational, Enviromental, Development*). Salah satu yang paling baik untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi kesehatan adalah model Precede- Proceed. Precede bagian dari fase (1- 4) berfokus pada perencanaan program, dan bagian Proceed fase (5-8) berfokus pada implementasi dan evaluasi. Delapan fase dari model panduan dalam menciptakan program promosi kesehatan, dimulai dengan hasil yang lebih umum dan pindah ke hasil yang lebih

spesifik. Secara bertahap, proses mengarah ke penciptaan sebuah program, pemberian program, dan evaluasi program (Fertman, 2010).



Gambar 2.1 Teori Precede Proceed (Green & Kreuter, 2005)

Fase 1:

Penilaian sosial dalam fase ini, program menyoroti kualitas dari hasil keluaran secara spesifik, indikator utama sosial dari kesehatan dalam populasi spesifik (contohnya derajat kemiskinan, rata-rata kriminalitas, ketidakhadiran, atau tingkat pendidikan yang rendah) yang berefek kepada kesehatan dan kualitas hidup. Sebagai contoh, pada pekerjaan industri yang kumuh dan berbahaya dengan rata-rata kecelakaan yang tinggi, sedikitnya pelayanan kesehatan, dan keterbatasan kesediaan makanan diluar pedangang keliling,

pekerja mungkin merasa tidak aman dan menjadi tidak sehat selama kondisi bekerja.

Fase 2:

Penilaian Epidemiologi Dalam fase kedua, setelah spesifik masalah sosial yang berkaitan dengan buruknya kualitas kehidupan dalam fase pertama, program mengidentifikasi dimana masalah kesehatan atau faktor lain yang berperan dalam perburukan kualitas hidup. Masalah kesehatan akan dianalisis berdasarkan dua faktor: pentingnya dalam artian bagaimana hubungannya dengan masalah kesehatan untuk mengidentifikasi indikator sosial dalam penilaian sosial dan bagaimana menerima untuk merubah masalah kesehatan yang ada. Setelah prioritas utama masalah kesehatan stabil, identifikasi dari determinan yang mengarah pada munculnya masalah kesehatan.

Detailnya, adalah apa faktor lingkungan, faktor perilaku, dan indikator genetik yang mengarah kepada permasalahan kesehatan yang spesifik? Kepentingan yang sama dan analisis perubahan akan menampilkan identifikasi faktor mana yang menjadi target dalam program promosi kesehatan. Melanjutkan dari contoh sisi pekerjaan, program akan mengumpulkan data masalah kesehatan dalam populasi yang akan mengarahkan kepada ketidakpedulian, seperti obesitas, penyakit hati, kanker, dan penyakit menular. Setelah penyakit diurutkan berdasarkan kepentingan dan kemampuan untuk diubah, perencana akan memilih salah satu masalah kesehatan. Langkah selanjutnya dalam penilaian ini adalah akan mengidentifikasi penyebab utama dari penyakit tersebut, seperti faktor lingkungan (contohnya racun, kondisi kerja yang penuh tekanan, atau kondisi pekerjaan yang tidak terkontrol), faktor perilaku (contohnya 13 sedikitnya aktivitas fisik, diet yang buruk, merokok, atau konsumsi alkohol), dan faktor genetik (contohnya riwayat keluarga). Pentingnya dan perubahan data akan dianalisis, dan kemudian satu atau beberapa dari faktor resiko ini akan dipilih menjadi fokus. Untuk melengkapi fase ini, tujuan status kesehatan, perilaku objektif, dan lingkungan objek akan disusun.

Fase 3:

Penilaian Pendidikan dan Ekologis Fokus dalam fase 3 berganti menjadi faktor mediasi yang membantu atau menghindarkan sebuah lingkungan positif atau perilaku positif. Faktor-faktor ini dikelompokkan kedalam tiga kategori: faktor-faktor predisposisi, faktor-faktor pemungkin dan faktor-faktor penguat (Green & Kreuter, 2005). Faktor-faktor predisposisi adalah yang dapat mendukung atau mengurangi untuk memotivasi perubahan, seperti sikap dan pengetahuan. Faktor-faktor pemungkin adalah yang dapat mendukung atau mengurangi dari perubahan, seperti sumber daya atau keahlian. Faktor-faktor penguat yang dapat membantu melanjutkan motivasi dan merubah dengan memberikan umpan balik atau penghargaan.

Faktor-faktor ini dianalisis berdasarkan pentingnya, perubahan, dan kemungkinan (adalah, seberapa banyak faktor yang mungkin dapat dimasukan dalam sebuah program). Faktor-faktor kemudian dipilih untuk disajikan sebagai dasar untuk pengembangan program, dan keobjektifitasan pendidikan yang telah disusun.

Green juga menyatakan bahwa Perilaku dipengaruhi dan dibentuk atau ditentukan oleh delapan fase, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan dalam fase 3. Didalam fase 3 terdapat beberapa faktor yang dikelompokkan dalam tiga kategori, (Green & Kreuter, 2005) yaitu:

1. *Predisposing factors* (faktor predisposisi) dapat berupa : pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, sosio ekonomi, umur, jenis kelamin dan persepsi yang berhubungan dengan motivasi individu
2. *Enabling factors* (faktor pemungkin) dapat terwujud dalam bentuk ketersediaan sumber daya, biaya, aksesibilitas, rujukan, aturan/hukum, keterampilan, perilaku petugas kebersihan, perilaku pihak pengelola pasar, sumber daya atau keahlian dll.
3. *Reinforcing factors* (faktor penguat) yang terdapat pada lingkungan secara fisik yaitu: perilaku petugas, teman, *parents*, pengusaha, dll.

2.1.3 Partisipasi

2.1.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok individu dalam suatu kegiatan (Meilinawati, 2018). Dengan adanya partisipasi dari setiap masyarakat maka gotong royong dapat terlaksana sehingga kebersihan lingkungan yang ada di wilayah sekitar akan terlihat bersih dan nyaman karena tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan maupun di dekat pemukiman masyarakat (Mujahidin, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan adalah para pedagang baik pemilik toko, pedagang kaki lima maupun pedagang musiman dan pedagang asongan yang berjualan di sekitar pasar wonodri semarang dalam menjaga kebersihan pasar. Sebab pengelolaan persampahan sangat perlu mendapatkan perhatian, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan kepedulian lingkungan pasar, kesehatan lingkungan pasar, kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan lain sebagainya.

Menurut Hessel yang mengutip pernyataan Nelson menyebutkan bahwa terdapat dua macam bentuk partisipasi, yaitu: Satu Partisipasi Horizontal yang merupakan partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Dua Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. Sehingga, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila individu tersebut benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut.

Adapun rasa tanggung jawab merupakan salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana juga merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Rasa

tanggung jawab ini merupakan suatu implikasi positif yang cukup luas bagi proses sebuah pembangunan (Hessel, 2005).

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat dari beberapa faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program dan juga bersifat menghambat. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: (1) Usia, faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka yang berasal dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya (Suroso, *et al.* 2014).

(2) Jenis Kelamin, Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

(3) Pendidikan, Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. (4) Pekerjaan dan Penghasilan, Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

(5) Lamanya Tinggal, Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut (Suroso, *et al.* 2014).

2.2 Pasar

2.2.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah suatu lapangan atau lahan terbuka (pelataran) yang sebagian memiliki atap maupun tidak beratap yang berupa penyediaan suatu produk atau tenaga untuk kepentingan dagang atau untuk pembuatan suatu produk lain atau untuk perjual-belikan kembali. Pasar juga merupakan suatu tempat bertemunya antara produsen dan konsumen dan juga saling berdampingan antara peminat yang ada di pasar dan negosiasi seseorang untuk mendapatkan dan menepakati nilai yang akan dibayarkan yang biasa disebut dengan harga sebuah barang. Secara fisik, pasar merupakan suatu tempat berkumpulnya lebih dari 2 orang atau beberapa pedagang tetap yang akan menempati bangunan-bangunan untuk melangsungkan proses terjadinya tukar menukar barang dengan nilai rupiah atau disebut uang. Sedangkan secara fungsional, pasar ialah suatu tempat yang terbentuk dari beberapa proses dalam tukar menukar baik berupa suatu produk dengan uang atau uang dengan jasa.

Secara ekonomi, pasar merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai pusat sosial ekonomi dari suatu lingkungan, dimana penduduk atau masyarakat dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian berdasarkan pelayanannya pasar merupakan suatu sarana umum yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual-beli bagi masyarakat pada umumnya, dimana para pedagang secara teratur dan secara langsung memperkenalkan suatu produk baik barang maupun jasa dengan mengutamakan dan berfokus pada tingkat kebutuhan dan pendapatan dalam sehari-hari (Bakri *et al.*, 2012).

2.2.2 Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya

Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi 2, yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

2.2.2.1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan, pada umumnya pasar tradisional terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Pasar tradisional merupakan suatu wujud tempat pembelajaran sejak lama yang merupakan bentuk dari tempat pelayanan ekonomi dan sosial. Pasar tradisional juga termasuk salah satu sektor pendorong bagi pendapatan masyarakat yang sangat penting untuk sebagian besar penduduk atau warga masyarakat di Indonesia. Berdasarkan jenisnya pasar tradisional sebagai perusahaan daerah yang digolongkan menjadi 3 jenis (Oktavia, 2007), yaitu:

- A. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Pasar eceran : yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
 2. Pasar grosir : yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
 3. Pasar induk : Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosirgrosir dan pusat pembelian.

Dari jenis pasar menurut kegiatannya Pasar Wonodri termasuk dalam jenis pasar eceran karena dalam proses jual beli yang dilakukan selama ini sebagian besar konsumen membeli barang dagangan dari penjual dalam bentuk eceran untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali dalam skala kecil.

- B. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:

1. Pasar regional : yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang

yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

2. Pasar kota : yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000-220.000 penduduk, yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir.
3. Pasar wilayah (distrik) : yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk, yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.
4. Pasar lingkungan : yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/ semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi permukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000- 15.000 penduduk saja, yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.
5. Pasar khusus : yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

Dari jenis pasar menurut lokasi dan kemampuan pelayanan Pasar Wonodri saat ini tergolong pasar lingkungan. Hal ini ditinjau dari letak pasar strategis, bangunan permanen dan sudah berpindah ke gedung bangunan baru, dekat dengan kelurahan.

C. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:

1. Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.
2. Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.
3. Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.

4. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Seperti : pasar murah Idul fitri, pasar Maulud.

Pasar Wonodri termasuk jenis pasar siang-malam hari dilihat dari waktu kegiatannya. Meskipun pasar ini mulai beroperasi dari pukul 01.00 WIB (dini hari) hingga pukul 10.00 WIB setiap harinya, walaupun hari libur atau hari libur nasional pasar ini tetap buka.

Saat ini banyak warga yang kurang mampu menggantungkan nasib pada pasar, terutama yang berada di wilayah pedesaan karena mereka terhubung secara langsung. Namun pasar tradisional pada umumnya merupakan salah satu jembatan penghubung dengan pasar tradisional yang berada di perkotaan karena mereka akan dijadikan sebagai pusat kulakan bagi pedagang-pedagang di kota.

Pasar Tradisional juga termasuk dalam satu dari sekian banyak warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan sudah ada dari sejak lama, dimana pasar tradisional adalah perkembangan dari adanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yaitu berupa tukar-menukar produk atau barang pada masa lampau. Mulai munculnya pasar tradisional, kemudian terjadi sebuah aktivitas sosial yang sering dilakukan oleh berbagai jenis kalangan di pasar, seperti produsen dan konsumen maupun pengelola pasar itu sendiri.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Pasar Tradisional adalah pasar yang sebagian besar dagangannya adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan yang masih sederhana dengan fasilitas infrastrukturnya juga masih sangat sederhana dan belum mengindahkan kaidah kesehatan. Peranan pasar tradisional sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Pasar tradisional secara umum memiliki gambaran yang terkesan kumuh, kotor, becek (banyak genangan air dimana-mana), bau tidak sedap dan pelayanannya kurang.

Pasar dapat menjadi jalur utama untuk tempat perkembangbiakan binatang penular penyakit seperti kecoa, lalat, tikus dsb. Pasar juga dapat menjadi tempat penyebaran penyakit seperti kasus kolera di Amerika Latin, SARS dan Flu Burung (*Avian Influenza*) di asia. Untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat terjadi di pasar, sehingga diperlukan pelaksanaan kebersihan lingkungan terkait pengelolaan sampah berdasarkan perilaku pedagang pasar yang baik (Depkes RI, 2011).

2.2.2.2 Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang tidak melakukan sebuah pembayaran secara bertatapmuka langsung, namun konsumen melakukan pengecekan terhadap label untuk melihat nominal yang tertera dalam label tersebut, dan pengambilan barang dilakukan secara mandiri oleh konsumen atau terdapat seorang pramuniaga atau pekerja yang akan melayani. Pada pasar modern yang dijual tidak hanya makanan, akan tetapi juga terdapat produk-produk lain yang memiliki tingkat ketahanan yang lama. Pasar modern terdapat berbagai jenis yaitu seperti: Minimarket, hipermart, supermarket, mall, mega mall, dll.

Penelitian Brata (2012: 143) menunjukkan bahwa pasar modern yang dianggap paling membahayakan perekonomian rakyat (pasar tradisional, warung, dan toko-toko kecil di pinggir jalan), adalah minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret yang keberadaannya sudah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan pasar-pasar modern ini ada yang beroperasi hingga 24 jam, sehingga dapat mempersempit jangkauan pedagang tradisional dan pedagang kecil. Akibatnya keberadaan pasar modern, seperti minimarket dan usaha sejenisnya berpotensi mematikan usaha kecil yang ada di sekitarnya.

2.2.3 Komponen Pasar

2.2.3.1 Pelaku Kegiatan Pasar

Pedagang/Produsen merupakan pelaku kegiatan yang ada di pasar yang menyediakan barang maupun jasa penjualan/perdagangan. Pedagang berperan sebagai yang melayani, mereka berhak memiliki barang-barang yang

dipasarkan meskipun kepemilikannya tidak secara fisik. Pada kenyataannya Pedagang kaki-lima, mempunyai peranan potensial terhadap ekonomi kota, dengan memberikan pelayanan yang efektif pada unit-unit kecil. Meskipun kehadirannya mampu meramaikan pasar, tetapi sering dianggap mengganggu karena menimbulkan masalah ketertiban, keamanan dan kebersihan (Santoso, 2017).

2.2.3.2 Pedagang

Pedagang adalah seseorang yang melakukan interaksi jual-beli yang menawarkan suatu produk atau barang baik yang diproduksi sendiri maupun tidak diproduksi sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Christine dan Kensil (2008) Pedagang merupakan seseorang yang melakukan aktivitas penjualan sebagai profesi sehari-hari. pertokoan biasanya merupakan suatu aktivitas pengambilan suatu barang untuk mendapatkan keuntungan.

Pedagang pasar tradisional adalah para penyedia produk atau penjual yang ada di sekitar area pasar tersebut yang mendistribusikan produk dari hasil kreativitas atau inovasi oleh masyarakat sekitar, sebagian besar para produsen menjual produknya kepada pembeli, terdapat berbagai macam penjual atau penyedia produk dan barang seperti pedagang kaki lima, pedagang buah-buah, pedagang produk lokal dan lain sebagainya.

Penjual atau produsen dapat dikelompokkan dalam dua kategori: Produsen kelas menengah atau biasa disebut sebagai Agen atau penjual dengan harga murah, dan Produsen Eceran/ pengecer. Sehingga dapat disimpulkan perilaku penjual atau pedagang merupakan sebuah reaksi dari seseorang kepada *stimulus* lingkungan sekitar. Perilaku pedagang juga dapat dikatakan suatu sifat yang dimiliki oleh individu yang berdagang, guna mendapatkan reaksi dari lingkungan terhadap suatu keadaan yang terjadi sekarang (Al Bara, 2016).

Table 2. 2 Jenis Pedagang Pasar Menurut Kriteria

No	Kriteria	Jenis Pedagang
1	Menurut jumlah pelaku	a. Pedagang individu b. Pedagang gabungan
2	Menurut jumlah kegiatan	a. Pedagang formal b. Pedagang informal
3	Menurut jumlah modal	a. Pedagang modal kecil b. Pedagang modal sedang c. Pedagang modal cukup d. Pedagang modal besar
4	Menurut jumlah status	a. Pedagang tetap b. Pedagang temporer
5	Menurut tempat asal	a. Pedagang kota b. Pedagang desa
6	Menurut cara penyaluran	a. Pedagang eceran b. Pedagang grosir c. Pedagang pengumpul
7	Menurut jangkauan pelayanan	a. Pedagang regional b. Pedagang kota e. Pedagang wilayah
8	Menurut cara pelayanan	a. Pedagang langsung b. Pedagang tidak langsung
9	Menurut materi pedagang	a. Pedagang barang riil b. Pedagang barang jasa

Sumber: Ananta Heri P, *Menahan Serbuan Pasar Modern:94-96*

2.2.3.3 Pembeli atau konsumen

Pembeli atau konsumen pasar adalah semua orang yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan langsung. Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu (Konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya (Subianto, 2007). Konsumen pasar berperan sebagai yang dilayani mereka datang dari berbagai tempat dan status maupun golongan. Pengunjung pasar adalah Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. Pengunjung yang datang ke pasar, selain untuk mendapatkan suatu barang, ada pula yang sekedar untuk memenuhi tuntutan interaksi sosial yaitu dengan mengobrol dan bertukar informasi.

2.2.3.4 Pengelola Pasar

Pengelola Pasar adalah organisasi atau pihak pengelola pasar yang bertanggung jawab terhadap operasional harian pasar, keamanan pasar, kebersihan pasar, melakukan pengawasan terhadap pedagang terkait ketertiban dalam pengelolaan sampah, pengecekan fasilitas yang tersedia. Pengelola pasar ini juga bias merupakan pihak pemerintah setempat atau organisasi swadaya masyarakat (Kepmenkes RI No.519/MENKES/SK/VI/2008).

2.2.3.5 Penunjang

Penunjang di pasar yaitu : Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya dan beroperasinya pasar; Swasta pedagang penyewa tempat, pelaksana pembangunan pasar; Pengelola melaksanakan pembangunan, pengelola pemasaran tempat, pengelola kebersihan, pengelola distribusi barang dan stabilitas harga; Bank memperlancar kegiatan ekonomi (Heri P, 2011 dalam Devi, 2013).

2.3 Sampah

2.3.1 Pengertian Sampah

Definisi sampah menurut WHO (*World Health Organization*) Sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipergunakan, tidak di inginkan, tidak dikehendaki atau segala sesuatu yang tidak dipakai atau dibuang yang bersumber dari aktivitas makhluk hidup maupun dari alam dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah juga sebagian besar didefinisikan sebagai sisa limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam (Chandra, 2006).

Jenis sampah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: sampah domestik, sampah industry, sampah alam (pertanian/ pertambangan) serta sampah pertambangan.

2.3.2 Sumber dan Jenis Sampah

2.3.2.1 Sumber-Sumber Sampah

Secara praktis sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, (Damanhuri, 2011) yaitu:

1. Sampah dari permukiman (*domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang.

2. Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, jalan raya, daerah komersial, perkantoran, pendidikan, industry, perkebunan/pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan tempat-tempat umum lainnya.

Sampah dari kedua jenis sumber ini (1 dan 2) dikenal sebagai sampah domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *municipal solid waste* (MSW).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sampah kota di Indonesia, sumber sampah kota dibagi berdasarkan :

1. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
2. Pasar
3. Kegiatan komersial seperti pertokoan
4. Kegiatan perkantoran
5. Hotel dan restoran
6. Kegiatan dari institusi seperti Pendidikan, industri, rumah sakit, untuk sampah yang sejenis sampah permukiman
7. Penyapuan jalan
8. Taman-taman.

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan, yang cukup banyak dijumpai. Sampah dari masing-masing sumber tersebut dapat dikatakan mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. Demikian juga timbulan (*generation*) sampah

masing-masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lain, seperti terlihat dalam standar pada :

Table 2. 3 Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya

No	Komponen sumber sampah	Satuan	Volume (Liter)	Berat (kg)
1	Rumah permanen	/orang/hari	2,25 – 2.50	0,350 – 0,400
2	Rumah semi permanen	/orang/hari	2,00 – 2,25	0,300 – 0,350
3	Rumah non-permanen	/orang/hari	1,75-2,00	0,250-0,300
4	Kantor	/pegawai/hari	0,50 - 0,75	0,025 - 0,100
5	Toko/ruko	/petugas/har	2,50 - 3,00	0,150 - 0,350
6	Sekolah	/murid/har	0,10 - 0,15	0,010 - 0,020
7	Jalan arteri sekunder	/m/hari	0,10 - 0,15	0,020 - 0,100
8	Jalan kolektor sekunder	/m/hari	0,10 - 0,15	0,010 - 0,050
9	Jalan local	/m/hari	0,05 - 0,10	0,005 - 0,025
10	Pasar	/m ² /hari	0,20 - 0,60	0,100 - 0,300

Sumber: Diktat Kuliah TL (Damanhuri-ITB)

2.3.2.2 Jenis Sampah

1. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, yaitu: Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.

Menurut Raman *et al.* 2013 (dalam Mondol, *et al* 2013) Sampah padat pasar juga merupakan sejenis sampah kota. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari pasar terutama limbah makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kulit, kayu, kaca, logam besi, dll. Karena kurangnya proses manajemen yang tepat, ini berbahaya untuk lingkungan sekitar dan juga bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Untuk negara-negara berkembang seperti pengelolaan limbah di pasar Bangladesh adalah masalah lingkungan dan keuangan yang berkembang.

2. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar. Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).

3. Sampah berdasarkan karakteristiknya, berupa: Abu (*Ashes*), sampah jalanan (*Street Sweeping*), berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri, bangkai binatang (*Dead Animal*), sampah pemukiman (*Household refuse*), Bangkai Kendaraan (*Abandoned vehicles*), sampah industry terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya, sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (*Demolotion waste*) sampah dari daerah, sampah padat pada air buangan (*Sewage Solid*) Sampah yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan, sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksis. (Mukono, 2006).

2.3.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas dan Kualitas Sampah

Menurut Slamet (2004) sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain :

1. Jumlah Penduduk Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah pun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.
2. Keadaan sosial ekonomi Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah, dan produk pertanian, industri dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

3. Kemajuan Teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.
4. Tingkat pendidikan, Menurut Hermawan (2005) Untuk meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan sangat penting karena melalui pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, kreatif dan rasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2.3.3 Pengelolaan sampah

2.3.3.1 Pengelolaan sampah

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbulan sampah. Masalah pengelolaan sampah perkotaan antara lain adalah keterbatasan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia. Masalah ini timbul di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan persampahan mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar yang meliputi : Meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat; Melindungi sumber daya alam (air); Melindungi fasilitas sosial ekonomi; Menunjang pembangunan sektor strategis.

Pengelolaan persampahan di negara industri sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/engineering, konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah terpadu di perlukan beberapa sarana pendukung untuk mengelola sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memberlakukan beberapa syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan sarana pendukung tersebut. Pelaksanaan pengelolaan

sampah terpadu adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dinas kebersihan dan pertamanan kota semarang berperan sebagai pembina KSM. Selain itu pemerintah kota semarang juga melibatkan aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memantau keberlangsungan pelaksanaan program. Pengelolaan sampah terpadu di kota semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dengan menggunakan berbagai sarana pendukung yang dimiliki oleh para KSM (Kustyardhi, R *et al* 2013).

Keberhasilan pengelolaan, bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah.

Untuk menjalankan sistem tersebut, harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan kota, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi, dan ilmu bahan. Sebelum UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah perkotaan (yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum) di Indonesia memosisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen sub sistem, yaitu : Peraturan/hukum; Kelembagaan dan organisasi; Teknik operasional; Pembiayaan; Peran serta masyarakat. Namun bila diperhatikan, konsep ini sebetulnya berlaku tidak hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, tetapi untuk sektor lain yang umumnya terkait dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima komponen tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek-aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.

2.4 Lingkungan

2.4.1 Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang hidup berupa organisme yang hidup di alam atau biasa disebut *biotic factor* dan segala sesuatu yang mati atau tidak hidup biasa dinamakan *abiotic factor*. Keseimbangan alam pada dasarnya dapat dijaga, dan dipelihara, namun bukan berarti bahwa suatu makhluk hidup tidak dapat berubah. Karena sifat dari makhluk hidup itu sendiri adalah dinamis.

Environmental sangat sering digunakan secara berdampingan dengan lingkungan hidup. Padahal kedua kata tersebut secara harfiah memiliki arti yang berbeda, namun secara *general* digunakan dengan maksud yang sama. Dalam arti secara luas lingkungan dibedakan menjadi empat yaitu Lingkungan fisik, kimia, dan biologi (manusia, hewan, dan tumbuhan) serta lingkungan sosial. Sebenarnya lingkungan hidup memiliki arti yang tidak sama dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan (Soegianto, 2005).

Pendapat Otto Soemarwoto (dalam Akib, 2016), mengatakan bahwa lingkungan hidup memiliki arti yaitu sebagai tempat yang dihuni oleh suatu ekosistem yang berdampingan dengan benda hidup dan benda mati di dalamnya. Cakupan dari kawasan untuk hidup memiliki arti sangat luas. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup.

L.L. Bernard (dalam Danusaputra, 1985) mengategorikan lingkungan menjadi tiga bagian besar, yaitu: lingkungan anorganik, lingkungan organik, dan lingkungan sosial, yang kemudian di uraikan menjadi tiga kelompok: Lingkungan fisiososial adalah berupa sebuah kebudayaan materiil atau alat, Lingkungan biososial seperti manusia yang berinteraksi terhadap individu yang lainnya, tumbuhan dan hewan sekitar serta segala sesuatu atau bahan

yang digunakan oleh manusia yang berasal dari sumber organik, serta lingkungan psikososial, adalah semua yang berkaitan dengan perasaan manusia (sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan). Dimana terlihat dari perilaku, kepercayaan, pandangan, *language*, dan lain-lain.

2.4.2 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar

Pasar sehat merupakan suatu tempat dimana semua pihak-pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman, bergizi dan lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sehingga sebuah pasar harus memenuhi persyaratan kesehatan baik dari segi sanitasi maupun dari konstruksi. Adapun persyaratan kesehatan pasar mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, sebagai berikut :

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar :

1. Lokasi

Lokasi harus sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat; tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir; tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan termasuk sempadan jalan; tidak terletak didaerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan; memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya; memiliki sarana jalan dan transportasi; dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi; rasio perbandingan antara tempat terbuka dengan bangunan pasar diusahakan minimal 30% : 70%.

2. Bangunan

a. Penataan Ruang Dagang

Bangunan dan rancangan bangun harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku; pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti basah, kering, penjual unggas hidup, pemotong unggas, dll; pembagian *zoning* yang diberi identitas; tersedianya air bersih; jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar

utama minimal 10 m atau dibatasi dengan tembok pembatas minimal 1,5 m; Los atau kios yang menghadap keluar sebaiknya diperuntukan kios atau los non sembako seperti tekstil dan alat kebutuhan rumah tangga. Los yang berada ditengah-tengah antara toko dan kios diperuntukan sayur, daging, ayam, ikan basah serta sembako lainnya;

Setiap los memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik, dan mudah dilihat; Setiap los memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter; Letak kios tidak menutupi arah angin; Peletakan kios sebagai pembatas jalan umum dan area pasar dapat dibuat dua muka; Untuk penjual bahan pangan basah terdapat meja tempat jualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu serta tersedia tempat untuk pencucian bahan dagangan dan peralatan. kemudian terdapat tempat sampah kering dan basah yang kedap air dan mudah dibersihkan. Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melewati area penjualan;

Untuk penjual bahan pangan kering tersedia meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan tempat sampah basah dan kering yang kedap air dan mudah dibersihkan; Untuk penjual makanan jadi/siap jadi , tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu yang disertai dengan dengan tempat cuci tangan, cuci peralatan yang terbuat dari bahan anti karat dengan kemiringan yang cukup. Saluran air limbah dari tempat cuci memiliki kemiringan khusus dan tidak melewati area perdagangan. Terdapat tempat sampah basah dan kering yang kedap air dan mudah dibersihkan.

b. Konstruksi

Untuk konstruksi atap Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat berkembangnya binatang penular penyakit. Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit. Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. Atap bagian atas dipasang bahan material tembus cahaya dan didesain dengan karakter daerah pasar tersebut dibangun; Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang dan dinding yang sering terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air; Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan dan lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air.

c. Tangga

Tinggi lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terdapat pegangan tangan di kanan kiri tanggayang terbuat dari bahan yang kuat. Lantai tangga sendiri menggunakan bahan yang tidak licin. Pencahayaan pada tangga minimal 100 lux.

d. Ventilasi

Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*).

e. Pencahayaan

Pencahayaan cukup terang dan dapat dilihat barang dagangan dengan jelas minimal 100 lux. Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya memperhatikan arah matahari terbit.

f. Pintu

Khusus untuk pintu los penjual daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup pintu sendiri atau tirai plastik.

3. Sanitasi

Untuk penyediaan air bersih, tersedia minimal 40 liter per pedagang yang ditampung di tandon air dilengkapi dengan kran air yang tidak bocor yang berjarak minimal 10 meter dari pembuangan limbah; Untuk pengolahan

sampahnya, setiap lorong/kios/los terdapat tempat sampah kering dan basah. Lokasi TPS pasar tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar; Drainase pada sistem pasar, tertutup dengan kisi-kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan dan tidak berada dibawah bangunan pasar; Adanya pemisahan antara kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan dan jumlahnya tergantung dari jumlah pedagang yang berada di pasar tersebut. Setiap 50 pedagang dibutuhkan 1 buah kamar mandi di dalamnya.

4. Keamanan

Tersedia hydran air sebagai proteksi kebakaran dengan jumlah cukup menurut ketentuan berlaku; Tersedia pos keamanan yang dilengkapi dengan personil dan peralatannya

5. Fasilitas lain

Terdapat fasilitas ibadah seperti mushola yang terdapat di lokasi strategis dan tidak berdekatan dengan penjual daging, ikan, dan penjualan unggas hidup. Selain itu tersedia area parkir dan ruang kantor pengelola.

2.5 Aspek Peraturan / Hukum (kebijakan yang berlaku)

2.5.1 Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah, Pada BAB VI Hak dan Kewajiban Paragraf 3 tentang Pengelola kawasan pasal 13 berisi Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

BAB VII Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional pasal (15) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional meliputi: Pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Bagian ketiga Penanganan Sampah. Pada Pasal 23 berisi tentang Penanganan sampah meliputi kegiatan: Pemilahan; Pengumpulan; Pengangkutan; Pengolahan; dan Pemrosesan akhir sampah.

Pada Pasal 24, ayat ayat (1) Pemilahan sampah dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya; pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan fasilitas lainnya; dan Pemerintah Daerah. (2) Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: sampah/limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mudah terurai; sampah yang dapat digunakan kembali; sampah yang dapat didaur ulang; dan sampah lainnya. (3) Pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan, termasuk kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. (4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah regional.

Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); diberi label atau tanda; dan bahan, bentuk, dan warna wadah. Pada pasal 25 ayat (2) dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: TPS; TPS 3R; dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah. Pada pasal 28 ayat (3) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, BAB I Pasal 1 dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: ayat (3) sumber sampah adalah asal timbulan sampah, ayat (6) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional, tingkat yang terpadu dan berkelanjutan.

Pada bagian kedua pasal 3 ayat (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: Pembatasan

timbulan sampah; Pendaauran ulang; Pemanfaatan Kembali. Ayat (3) Penanganan dilakukan melalui: Pemilahan; Pengumpulan; Pengangkutan; Pengolahan; dan Pemrosesan Akhir. Pasal 4 ayat (1) strategi pengurangan meliputi: Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah; penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah; penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran; peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah; pembentukan system informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif; penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen.

Ayat (2) pada strategi penanganan tidak jauh berbeda seperti strategi pengurangan namun ada penambahan beberapa poin antara lain: penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; penguatan penegakan hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat; penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah. Sedangkan, pasal 5 ayat (1) berisi tentang target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi: poin a. Pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan poin b. Penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

2.6 Aspek Kelembagaan

2.6.1 Organisasi

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna dari sistem pengelolaan sampah. Organisasi dan manajemen mempunyai peran penting dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertical maupun horizontal dari badan pengelola (Affandy, 2015). Pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaan. Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan *stakeholders*. *Stakeholders* yang dimaksud adalah terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan (Damhuri dan Padmi, 2010;25).

2.6.1.1 Pemerintah

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu pemerintah daerah membentuk lembaga pengelola persampahan di kota Semarang. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 660.2/2001 tanggal 20 April 2001 Tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Kecamatan masing-masing di Kota Semarang. Meskipun demikian tanggung jawab pelaksanaan kebersihan di Kota Semarang tetap pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Secara khusus Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kebersihan.

Fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan mulai dari penyusunan rencana dan perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan; pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana fisik serta kegiatan kebersihan kota, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kebersihan kota; pemberian pelayanan umum di bidang kebersihan; pembinaan terhadap Cabang Dinas; pengadaan ketatausahaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang; Pengelolaan Administrasi perijinan; Pengelolaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya (Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Semarang, 2013).

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) persampahan setingkat unit kerja pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengelola sampah. Lembaga pengelola sampah yang dimaksud adalah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan; mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) atau ke TPA; dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

2.6.1.2 Swasta

Peran swasta dalam pengelolaan sampah skala perkotaan merupakan salah satu aspek penting yang harus ditingkatkan untuk pencapaian pengelolaan yang lebih maksimal. Swasta merupakan salah satu aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di luar peran pemerintah sebagai regulator. Sejauh ini peran swasta yang ada di perkotaan terkait pengelolaan sampah masih digeluti oleh perorangan. Harapannya keterlibatan swasta ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk semakin terus dan terus memelihara lingkungan dengan cara mengelola sampah dalam skala mikro (Manurung, 2013).

2.6.1.3 Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen dalam suatu komunitas yang menempati posisi penting dalam berbagai aspek pembangunan. Masyarakat selalu menjadi aspek utama karena pembangunan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam hal pengelolaan sampah. Melibatkan masyarakat secara langsung dan pedagang di sekitar pasar dengan melalui beberapa kegiatan atau melalui kelompok swadaya masyarakat maupun perkumpulan pedagang yang ada.

2.7 Aspek Teknik Operasional

Peningkatan timbulan sampah tidak sebanding dengan kualitas pengelolaan sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah ini bersifat integral, terpadu secara berantai dan berurutan. Berdasarkan SNI 19-2454-2002, tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk teknik operasional, mulai dari:

- 1)Pewadahan sampah
- 2)Pengumpulan sampah
- 3)Pemindahan sampah
- 4)Pengkangkutan sampah
- 5)Pengolahan dan pemilahan sampah
- 6)Pembuangan akhir sampah

Kegiatan pemilahan sampah dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah. Komitmen penuh dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan peningkatan peran serta masyarakat, swasta, maupun perguruan tinggi serta seluruh *stakeholder* bidang persampahan menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan di Indonesia (Hendra, 2016).

2.8 Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota dapat bergerak dengan lancar. Pembiayaan

merupakan salah satu hal yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan, termasuk sumber pendanaan untuk investasi, operasional dan pemeliharaan alat dan fasilitas persampahan lainnya. Pada beberapa daerah, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kepala daerah maupun legislative sehingga alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah sangat minim, yakni sebagian besar hanya <5% dari jumlah APBD. Masyarakat atau pedagang pasar memiliki peran aktif dalam pengelolaan sampah termasuk dalam hal pembiayaan atau pendanaan yang berupa penarikan iuran untuk pengelolaan sampah setiap bulannya di kawasan tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak keberatan mengeluarkan sedikit biaya untuk sistem pengelolaan sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan berdagang (Hendra, 2016).

Retribusi kebersihan adalah pemungutan iuran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan yang membuang langsung di TPA. Dasar Pemungutan iuran yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Adapun tarif retribusi kebersihan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga, niaga, tarif pengelolaan sampah pasar, dan tarif pengelolaan sampah PKL, tarif pembuangan langsung di TPA.

Retribusi kebersihan secara rinci diatur dalam peraturan Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 Tahun 2012. Adapun tarif pengelolaan sampah pasar sebagai berikut: Kios sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per kios per hari; Los sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per kios per hari; Dasaran Terbuka sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per dasaran terbuka per hari, dan untuk tarif pengelolaan sampah PKL, yaitu: jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) per hari; jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8

(delapan) meter sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari; jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari. Sedangkan tarif pembuangan langsung di TPA sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per m² (Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Semarang, 2013).

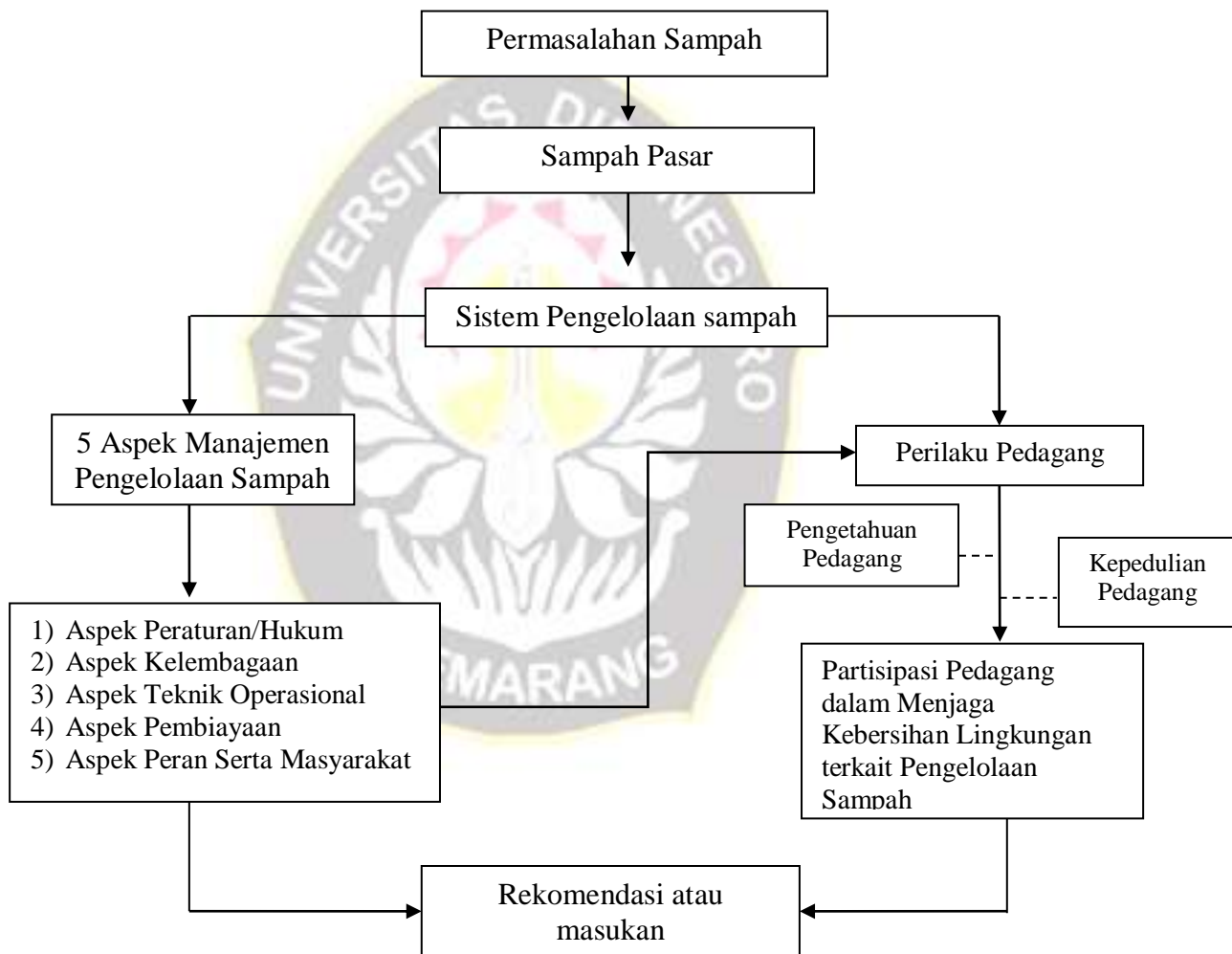
2.9 Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi penting karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, masyarakat sebagai penghasil sampah utama yang cukup besar karena sebagai akibat dari pola konsumsi yang terus-menerus mengalami peningkatan. Kedua, masyarakat seharusnya bisa mandiri dalam pengelolaan persampahan guna mendukung terciptanya pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, sehingga tidak selamanya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan ketiga, karena semakin terbatasnya lahan yang tersedia sehingga dapat diterapkan *zero waste* pada masyarakat guna menjawab permasalahan ketersediaan lahan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten Trenggalek hanya sebatas pada penyediaan tong sampah. Adapun peran dalam pemilahan sampah dilakukan secara tidak langsung karena sebagai akibat dari sampah yang tidak di angkut oleh pemerintah (Rahma Puspasari dan Mussadun, 2016).

Tanpa adanya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada perilaku yang sesuai dengan tujuan program. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu kendala di Indonesia. Meskipun di beberapa tempat sudah ada kelompok masyarakat yang peduli akan sampah, namun secara umum partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relative rendah. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya merupakan hal yang kerap terjadi. Peraturan dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dibuat terkait pengelolaan sampah sebagian besar belum sepenuhnya diinformasikan kepada masyarakat (Hendra, 2016).

2.10 Bagan Alur Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Bagan Alur Kerangka Pikir Penelitian